

Artikel: *Akses terbuka/Open access*

Analisis Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Sitasi: Ledhe, 2024, JSTAR 4(1), 40-57

Kronologi naskah.

Submit : 22 Mei 2024

Revisi : 29 Juni 2024

Diterima : 29 Juni 2024



Penyedia Data Statistik Berkualitas
untuk Indonesia Maju

Reformasi Birokrasi



Analisis Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Liguori Yuridis Ledhe¹

¹Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Indonesia

✉korespondensi author: liguori.ledhe@bps.go.id

Abstract

One of the overarching sustainable development goals in fighting poverty is to eradicate poverty in all its forms everywhere. This poses a significant challenge for areas where incidence and intensity of poverty are high. This study aimed to estimate and analyze multidimensional poverty index in Nusa Tenggara Timur province based on the Alkire and Foster framework using the March 2023 microdata obtained from the National Socio-Economic Survey (Susenas). The result showed that 34.80 percent of the population in NTT were multidimensionally poor and 10.25 percent were severely poor. Regarding intensity, poor people in NTT are deprived in 44 percent of total weighted indicators. The multidimensional poverty index at the province level was 0.15 and varied between 0.06 and 0.25 in regencies and municipality. By analyzing the contribution of each dimension and indicator toward MPI, this research found that 49 percent of MPI was attributed to health aspect while living standard and education contributed 31 and 20 percent, respectively. Among these dimensions, four dominant indicators were calorie intake, years of schooling, food insecurity and asset ownership, with a cumulative contribution of 77.23 percent toward MPI. Furthermore, this study compared multidimensional poverty in urban and rural areas. It concluded that the incidence and intensity of multidimensional poverty were much higher in rural than in urban areas. The values of MPI for rural and urban areas were 0.18 and 0.07, respectively. Lastly, a comparison between multidimensional and monetary approaches was conducted. The results were a 30 percent mismatch and the multidimensional method predicted a 1.7 times higher poverty headcount ratio than the result of monetary measure.

Keywords: *Multidimensional poverty index, health, education, living standard, deprivation, Nusa Tenggara Timur*

1. Pendahuluan

Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, indikator kemiskinan yang dirilis pemerintah menggunakan pendekatan moneter untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran dengan garis kemiskinan (Adji dkk, 2020). Selain tidak dapat menangkap secara akurat dan

menyeluruh aspek kemiskinan yang sifatnya multidimensi, terdapat sejumlah kritik yang dialamatkan pada pengukuran kemiskinan moneter (Alkire & Santos, 2014). Pertama, pola konsumsi antar penduduk seharusnya tidak seragam seperti yang diasumsikan dalam pendekatan moneter. Artinya, pengeluaran melebihi garis kemiskinan tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Kedua, perbedaan

harga yang dihadapi kelompok penduduk dapat menurunkan akurasi garis kemiskinan. Ketiga, terdapat barang dan jasa yang diakses masyarakat yang tidak tersedia harga pasarnya. Keempat, tidak tersedianya informasi distribusi pendapatan antara anggota rumah tangga, dan kelima perbedaan faktor konversi pemanfaatan pendapatan menjadi pemenuhan fungsi dasar manusia antar kelompok umur dan jenis kelamin.

Terdapat sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya disparitas antara pengukuran kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi. Mengandalkan pengukuran kemiskinan moneter semata dapat menyebabkan bias (*downward bias*) karena pengukuran berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran tidak dapat menangkap dimensi non-moneter dari kesejahteraan hidup (Prasetyo, 2022). Untuk itu, diperlukan pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menjawab tantangan permasalahan yang terjadi pada metode moneter. Pengukuran kemiskinan secara multidimensi dengan demikian menjadi komplemen terhadap pengukuran kemiskinan moneter sekaligus menjawab kebutuhan pengukuran kemiskinan sesuai tujuan SDGS untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.

Penelitian tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami deprivasi dalam berbagai dimensi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

proporsi penduduk miskin dengan pendekatan pengeluaran. Pada tahun 2011, dengan pendekatan pengeluaran, persentase penduduk miskin mencapai 12,14 persen, sedangkan secara multidimensi terdapat 73,4 persen yang mengalami kemiskinan (Artha & Dartanto, 2018). Penelitian serupa lintas negara yang dilakukan oleh Alkire & Santos (2010) menemukan bahwa 20,8 persen penduduk Indonesia tergolong miskin secara multidimensi pada tahun 2007 sedangkan data kemiskinan moneter yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah 16,58 persen (Badan Pusat Statistik, 2007). Sementara itu, penelitian yang lebih mutakhir yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa (2023) menunjukkan bahwa angka kemiskinan multidimensi di Indonesia menurun dari 48,98 persen pada tahun 2012 menjadi 14,34 persen pada tahun 2021. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran yang mencapai 15,12 persen pada tahun 2012 dan 10,14 persen pada tahun 2021.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kemiskinan moneter di Nusa Tenggara Timur (NTT) jauh lebih tinggi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik, 2024c), pada tahun 2023, kemiskinan di NTT mencakup 19,96 persen penduduk sementara di tingkat nasional hanya mencapai 9,36 persen. Kondisi ini menempatkan NTT sebagai provinsi ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua

Barat. Selain itu, tingkat kemiskinan di NTT mengalami penurunan yang relatif sangat lambat dibandingkan provinsi-provinsi lain. Dalam periode 2012-2023, tingkat kemiskinan di NTT turun sebesar 4,41 persen dari 20,88 persen menjadi 19,96 persen. Penurunan ini jauh lebih lambat dibandingkan Papua yang berhasil menurunkan proporsi penduduk miskin sebesar 16,31 persen dan Papua Barat 27,34 persen dalam periode 2012-2023.

Indikator kemiskinan lain yang dihasilkan BPS (Badan Pusat Statistik, 2024a) seperti indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menempatkan NTT sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat kedalaman kemiskinan di NTT pada tahun 2023 adalah 3,33, tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat; sementara di tingkat nasional indeks kedalaman adalah 1,53. Sejalan dengan tingkat kedalaman, indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 juga menempatkan NTT pada posisi keempat tertinggi di tingkat nasional. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa penduduk di NTT mengalami kemiskinan yang lebih parah dibandingkan di tingkat nasional.

Selain indikator kemiskinan, pengukuran tingkat kesejahteraan juga menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk menangkap dimensi kesejahteraan yang lebih luas. Pada tahun 2023, IPM adalah sebesar 66,68 sehingga NTT tergolong dalam empat provinsi dengan pembangunan sedang bersama Kalimantan Barat,

Papua dan Papua Barat; sementara provinsi-provinsi lain di Indonesia telah masuk dalam kategori pembangunan manusia tinggi dengan nilai IPM lebih dari 70 (Badan Pusat Statistik, 2024b). Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di NTT mengalami tingkat deprivasi yang lebih tinggi ditinjau dari dimensi kesehatan, pendidikan dan moneter.

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi berdasarkan ukuran moneter dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah berdasarkan ukuran multidimensi, kemiskinan di NTT masih menjadi permasalahan yang relevan untuk diteliti. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus menganalisis kemiskinan multidimensi di NTT masih sangat terbatas. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Artha & Dartanto, (2018) dan Perkumpulan Prakarsa, (2023) menggunakan data tingkat nasional dan disagregasi terbatas hingga level provinsi, sehingga membuka ruang untuk dilakukan penelitian pada bidang ini khusus di provinsi NTT untuk dapat menganalisis kondisi kemiskinan hingga level kabupaten/kota.

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi penduduk miskin dan mengestimasi indeks kemiskinan multidimensi dengan metode yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (Alkire & Foster, 2011). Selanjutnya dilakukan analisis tingkat deprivasi dan kontribusi deprivasi terhadap indeks kemiskinan multidimensi. Penelitian ini akan mengeksplorasi intensitas deprivasi untuk menganalisis dimensi kemiskinan.

Hal ini untuk mengakomodasi cara pengukuran kemiskinan yang memperhatikan perbedaan derajat kemiskinan antar penduduk.

Analisis kemiskinan multidimensi dilakukan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (selanjutnya disingkat AF) dengan melakukan beberapa penyesuaian berdasarkan ketersediaan data. Menurut Alkire dkk, (2023), penentuan dimensi kemiskinan dapat didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, aspek parsimoni dalam penelitian untuk memudahkan komparasi dengan indikator kemiskinan moneter. Kedua, terdapat konsensus bahwa dimensi tersebut umum digunakan dalam mengukur perkembangan kesejahteraan dan pembangunan seperti yang digunakan dalam indeks pembangunan manusia. Ketiga, ketersediaan data yang lebih baik.

Terdapat tiga dimensi yang umum digunakan yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Alkire & Foster, 2008; Artha & Dartanto, 2018; Prasetyo, 2022). Ketiga dimensi ini sama dengan dimensi dalam penentuan indeks pembangunan manusia dan dikembangkan oleh OPHI dan UNDP (Alkire & Santos, 2014; UNDP, 2023). Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan sepuluh indikator yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu (Alkire & Santos, 2014; Artha & Dartanto, 2018; Perkumpulan Prakarsa, 2023; Prasetyo, 2022; Salam dkk, 2022).

Dimensi pendidikan menggunakan dua indikator yaitu lama sekolah dan partisipasi sekolah anak usia sekolah. Indikator lama sekolah mengukur level pengetahuan dan pemahaman anggota rumah tangga. Meskipun indikator ini mengabaikan tingkat kualitas pendidikan, lama sekolah dapat menjadi proksi keberfungsian penduduk yang membutuhkan pendidikan seperti literasi membaca dan menulis, kemampuan numerik dan mencerna informasi. Indikator partisipasi sekolah mengukur apakah anak usia sekolah dapat mengakses dan terpapar pada lingkungan pendidikan. Adanya anak yang mengakses pendidikan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pengetahuan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang tidak memiliki anak usia sekolah dianggap tidak mengalami deprivasi pada indikator ini (Alkire & Santos, 2010).

Dimensi kesehatan dalam penelitian ini diukur menggunakan dua indikator yang merupakan proksi terhadap kondisi malnutrisi. Dalam *global multidimensional poverty index* (Global MPI), indikator yang digunakan adalah kondisi malnutrisi dan angka kematian anak. Namun, karena keterbatasan data, indikator yang digunakan pada studi ini adalah konsumsi kalori perkapita. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2019, rata-rata angka kecukupan energi untuk penduduk Indonesia adalah 2100 kilo kalori per kapita per hari pada tingkat konsumsi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang

Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, 2019). Ketidacukupan konsumsi kalori dalam jangka panjang dapat menyebabkan kondisi malnutrisi yang dapat dikaitkan dengan prevalensi peningkatan masalah kesehatan dan gangguan dalam aktivitas (Alkire & Santos, 2010). Untuk melengkapi indikator ini, digunakan juga tingkat kerawanan pangan yang dialami rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan ini diukur menggunakan pendekatan *food insecurity experience scale* yang dikembangkan oleh FAO. Tingkat kerawanan pangan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental. Orang dewasa dan anak-anak yang tinggal dalam rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental (Brucker, 2017; Cook dkk, 2006; Hanmer dkk, 2018).

Dimensi standar hidup layak menggunakan enam indikator, yaitu indikator air minum layak, sanitasi, ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai, sumber penerangan dan

kepemilikan aset. Empat indikator pertama merupakan indikator yang bersesuaian dengan tujuan pembangunan SDGs bidang perumahan dan pemukiman (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Sementara indikator dua lainnya adalah indikator yang juga digunakan dalam global MPI. Indikator-indikator pada dimensi ini tidak mengukur secara langsung keberfungsian atau kapabilitas individu, namun memiliki keterkaitan erat karena memfasilitasi tercapainya hidup yang layak (Alkire & Santos, 2010).

Setiap dimensi mendapat bobot yang seimbang yaitu $1/3$ dan masing-masing indikator dalam setiap dimensi mendapatkan bobot yang setara. Dimensi pendidikan dan kesehatan menggunakan masing-masing dua indikator sehingga bobot untuk setiap indikator adalah $1/6$. Sementara itu, dimensi standar hidup menggunakan enam indikator sehingga penimbang untuk setiap indikator adalah $1/18$. Definisi operasional indikator dan deprivasinya secara lebih terperinci disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Definisi Deprivasi Menurut Indikator

Dimensi/ Indikator	Definisi Deprivasi
Dimensi Pendidikan	
Lama Sekolah	Tidak ada anggota rumah tangga yang tamat pendidikan dasar 9 tahun
Partisipasi Sekolah	Terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah/putus sekolah
Dimensi Kesehatan	
Kecukupan Kalori	Konsumsi kalori per kapita kurang dari 2100 kkal per hari
Status Kerawanan Pangan	Memiliki tingkat kerawanan pangan minimal sedang jika ada anggota rumah tangga yang melewatkan makan pada suatu hari tertentu, makan lebih sedikit dari seharusnya,

	kehabisan makanan, merasa lapar dan tidak makan, tidak makan seharian. Penyebab dari pengalaman ini adalah kurangnya uang atau sumber daya.
Dimensi Standar Hidup	
Air Minum Layak	Air minum bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi), lainnya.
Sanitasi	Tidak memiliki akses sanitasi layak jika tempat pembuangan akhir tinja adalah di kolam/sawah/sungai/danau/laut, pantai/tanah lapang/kebun atau lainnya, atau jika tinggal di daerah perkotaan tempat pembuangan akhir tinja adalah lubang tanah, atau rumah tangga menggunakan MCK umum/siapapun menggunakan atau ada fasilitas BAB tetapi tidak menggunakan atau tidak memiliki fasilitas BAB.
Sumber Penerangan	Sumber penerangan utama bukan listrik
Ketahanan Bangunan	Bangunan tidak memenuhi kriteria hunian layak SDGs jika: a. atap terbuat dari asbes, bambu, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia atau; b. dinding dari anyaman bambu, bambu atau lainnya atau; c. lantai dari bambu, tanah atau lainnya
Kecukupan Luas Tempat Tinggal	Luas lantai per kapita < 7,2 meter persegi
Kepemilikan Aset	Tidak memiliki salah satu aset berikut: lemari es/kulkas, AC, pemanas air, telepon rumah, komputer/laptop, emas/perhiasan minimal 10 gr, sepeda motor, perahu dan tidak memiliki mobil atau perahu motor

2. Metodologi

Bahan dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data mikro yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Cakupan pada penelitian ini adalah Provinsi NTT dan disagregasi dilakukan pada level kabupaten/kota dengan unit analisis adalah individu. Perangkat yang digunakan untuk pengolahan data adalah Microsoft Excel, SPSS 23 dan Tableau.

Metode Analisis Data

Metode penghitungan indikator kemiskinan yang digunakan adalah dengan pendekatan moneter seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan kabupaten kota dan pendekatan multidimensi (metode AF).

Metode AF dikenal dengan metode *dual cutoff* dalam penentuan kemiskinan. Pada tahap pertama akan dibentuk matriks capaian individu $Y_{n \times d}$ dengan n individu dan $d \geq 2$ dimensi

yang berisi y_{ij} yang merupakan karakteristik individu i pada indikator ke j . Capaian tersebut dibandingkan dengan cutoff pada dimensi ke- j yang terdapat pada vektor baris $z = [z_j]$ untuk membentuk matriks deprivasi $Y_{ij}^0 = [y_{ij}^0]$ berdasarkan kriteria berikut:

$$y_{ij}^0 = \begin{cases} 1 & \text{jika } y_{ij} < z_j \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

$y_{ij}^0 = 1$ artinya individu ke- i mengalami deprivasi pada indikator ke- j dan $y_{ij}^0 = 0$ artinya individu tidak mengalami deprivasi.

Pada tahap kedua, dimensi yang digunakan diberikan penimbang w_j dengan ketentuan $\sum w_j = 1$. Skor deprivasi yang dialami individu ke- i dapat diperoleh dengan penjumlahan tertimbang status deprivasi $c_i = \sum_j w_j y_{ij}^0$ sehingga diperoleh vektor kolom $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)'$. Dengan menetapkan suatu *cutoff* $0 < k \leq d$, penentuan kemiskinan dapat dilakukan sebagai berikut:

$$p_k = \begin{cases} 1 & \text{jika } c_i \geq k \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Dalam penelitian ini *cutoff* yang digunakan adalah $1/3$ seperti yang digunakan dalam indeks kemiskinan multidimensi global (*global MPI*) yang dikeluarkan oleh UNDP (UNDP, 2023). Jika skor deprivasi tertimbang individu $1/3$ atau lebih, maka individu tersebut diklasifikasi sebagai penduduk miskin multidimensi.

Proporsi penduduk miskin multidimensi (*Headcount ratio*, H) ditentukan dengan formula berikut:

$$H = \frac{q_k}{n} \text{ dengan } q_k = \sum_i p_k$$

Ukuran ini (H) hanya menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi tanpa memperhitungkan dimensi deprivasi yang dialami. Untuk itu, indikator tersebut disesuaikan dengan memasukkan rata-rata deprivasi yang dialami oleh individu yang tergolong miskin (A).

$$A = \frac{1}{q_k d} \sum_{i=1}^n c_i p_k$$

Indikator ini menggambarkan intensitas deprivasi atau rata-rata deprivasi (*deprivation share*) yang dialami oleh seluruh penduduk miskin (Alkire & Foster, 2011).

Perkalian antara *headcount ratio* (H) dan intensitas deprivasi (A) menghasilkan *adjusted headcount ratio* (M_0).

$$M_0 = H.A = \frac{1}{nd} \sum_{i=1}^n c_i p_k$$

M_0 juga disebut sebagai indeks kemiskinan multidimensi (*multidimensional poverty index*, *MPI*). Nilai *MPI* berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai *MPI* berarti semakin tinggi tingkat kemiskinan. Nilai *MPI* akan meningkat jika persentase penduduk miskin meningkat atau terjadi peningkatan pada intensitas deprivasi (UNDP, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Deprivasi Menurut Indikator

Tabel 2. Distribusi Penduduk yang Mengalami Deprivasi Menurut Indikator, 2023

Dimensi Indikator	Jumlah	%
Pendidikan		
Lama Sekolah	1.076.882	18,83
Partisipasi Sekolah	157.282	2,75
Kesehatan		
Kecukupan Kalori	3.829.332	66,97
Kerawanan Pangan	928.207	16,23
Standar Hidup		
Air Minum Layak	644.803	11,28
Sanitasi	1.076.754	18,83
Sumber Penerangan	279.268	4,88
Ketahanan Bangunan	2.057.637	35,99
Kecukupan Luas Lantai	1.114.839	19,50
Kepemilikan Aset	3.831.759	67,02
Total Populasi	5.717.627	

Sumber: BPS Provinsi NTT, Susenas Maret 2023 (data diolah)

Analisis deprivasi menurut indikator digunakan untuk menghitung jumlah dan persentase penduduk yang mengalami deprivasi pada indikator tertentu dalam setiap dimensi sehingga memberikan gambaran kesejahteraan seluruh penduduk.

Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengalami deprivasi sangat bervariasi antar setiap indikator dengan rentang antara 2,75 persen hingga 67,02 persen. Deprivasi yang sangat umum dialami oleh populasi penduduk di NTT adalah pada kecukupan energi dan kepemilikan aset.

Pada dimensi pendidikan, 18,83 persen populasi mengalami deprivasi karena tidak ada anggota rumah tangganya yang menamatkan pendidikan minimal tingkat SMP. Kondisi deprivasi ini dapat

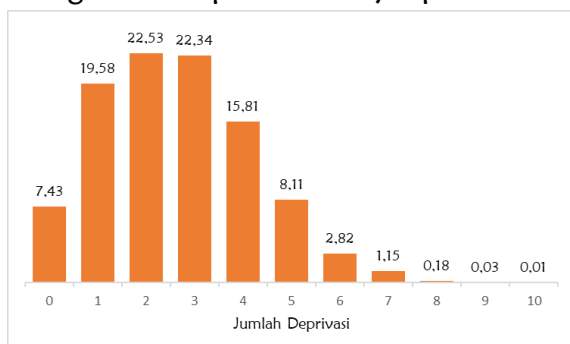
diakibatkan baik oleh kemiskinan pada masa lalu yang menyebabkan orang tidak dapat mengakses pendidikan maupun aneka faktor lainnya. Sementara itu, dari sisi partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun, hanya terdapat 2,75 persen penduduk yang mengalami deprivasi.

Pada dimensi kesehatan, indikator kecukupan konsumsi kalori perlu mendapatkan perhatian khusus karena lebih dari separuh penduduk mengalami deprivasi pada indikator ini. Deprivasi konsumsi kalori yang dialami ini dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan penduduk dengan meningkatkan prevalensi terhadap penyakit tertentu. Pada indikator kerawanan pangan teridentifikasi 16,23 persen penduduk mengalami kerawanan pangan tingkat sedang. Artinya, penduduk tersebut minimal melewatkan makan pada suatu hari tertentu, makan lebih sedikit dari seharusnya, kehabisan makanan, merasa lapar dan tidak makan, tidak makan seharian karena kekurangan sumber daya.

Untuk dimensi standar hidup, proporsi populasi yang mengalami deprivasi bervariasi. Sumber penerangan bukan listrik merupakan deprivasi yang dialami oleh hanya 4,88 persen rumah tangga. Kondisi ini bersesuaian dengan rasio elektrifikasi rumah tangga yang telah mencapai 92,70 persen pada tahun 2022 (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Sementara itu deprivasi di bidang akses air minum layak, akses terhadap sanitasi dan kecukupan luas tempat tinggal dialami kurang dari 20 persen

populasi. Indikator ketahanan bangunan yang merupakan kombinasi antara material atap, dinding dan lantai menyebabkan hampir empat puluh persen populasi terdeprivasi karena minimal salah satu dari bahan bangunan tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan dalam kriteria hunian layak SDGs (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Dalam analisis kemiskinan multidimensi, deprivasi yang dialami individu umumnya terjadi secara simultan. Artinya, suatu individu dapat mengalami deprivasi pada lebih dari satu indikator secara bersamaan. Seperti yang disajikan pada gambar 1, terdapat hampir lebih dari 3/4 populasi yang mengalami deprivasi pada lebih dari satu indikator; sedangkan yang mengalami deprivasi hanya pada satu



Gambar 1. Distribusi Penduduk Menurut Jumlah Deprivasi

indikator mencakup sekitar dua puluh persen dari total populasi, dan kurang dari 10 persen yang tidak mengalami deprivasi pada semua indikator.

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa distribusi populasi yang mengalami deprivasi menurun dengan meningkatnya jumlah deprivasi. Secara umum, penduduk NTT mengalami deprivasi pada dua sampai empat

indikator. Namun demikian, terdapat lebih dari 10 persen penduduk yang mengalami deprivasi pada lima indikator atau lebih.

Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur

Dengan pendekatan multidimensi, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT mencapai hampir dua juta orang atau mencakup 34,8 persen dari total populasi. Namun, kondisi kemiskinan ini bervariasi antara kabupaten/kota baik dari sisi jumlah, persentase, tingkat deprivasi maupun indeks kemiskinan multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi secara rata-rata adalah 0,15 dan bervariasi di tingkat kabupaten/kota dengan nilai terendah di kota Kupang dan Ende yaitu sebesar 0,06 dan tertinggi di Sumba Tengah yang mencapai 0,25.

Pada tingkat kabupaten/kota, persentase penduduk yang mengalami deprivasi pada minimal 1/3 dari total indikator tertimbang berkisar antara 14,64 persen di kota Kupang dan 53,91 persen di Sumba Tengah. Pada kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat dan Sumba Tengah, proporsi penduduk yang miskin secara multidimensi mencapai lebih dari 50 persen populasi. Selain itu, tingkat kemiskinan multidimensi yang relatif tinggi juga terjadi di kabupaten Sumba Barat Daya, Sikka, dan Sumba Timur yang mencapai lebih dari 40 persen populasi. Sementara itu, penduduk pada kabupaten-kabupaten lain di NTT mengalami kemiskinan multidimensi antara 20–40 persen, kecuali kabupaten Ende dan kota Kupang dengan proporsi

penduduk miskin kurang dari 15 persen populasinya.

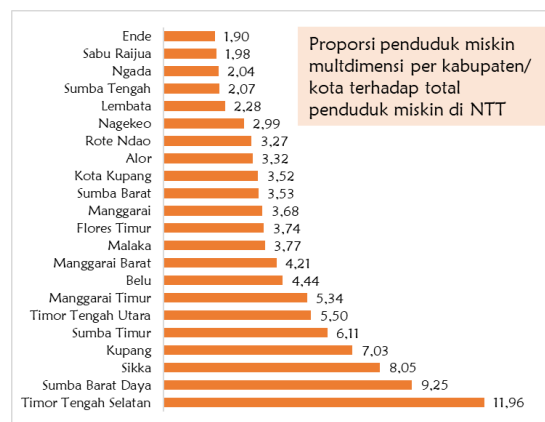
Tabel 3. Indikator Kemiskinan Multidimensi dan Kemiskinan Moneter di Nusa Tenggara Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Miskin Multidimensi		Intensitas (A)	MPI	Rentan Miskin Multidimensi		Sanga Miskin Multidimensi		Miskin Moneter (%)	Peringkat	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	%			Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%		Monev	Multidimensi
Sumba Barat	70,29	51,41	0,45	0,23	36,81	26,92	24,54	17,95	27,17	18	21
Sumba Timur	121,52	45,10	0,47	0,21	66,20	24,57	53,39	19,82	28,08	20	17
Kupang	139,96	33,79	0,45	0,15	128,46	31,01	49,60	11,98	21,78	11	10
Timor Tengah Selatan	237,91	50,13	0,42	0,21	135,74	28,60	68,18	14,36	25,18	16	20
Timor Tengah Utara	109,37	41,79	0,45	0,19	76,13	29,09	32,93	12,58	21,85	12	16
Belu	88,35	38,08	0,43	0,16	73,24	31,57	22,17	9,56	14,30	6	14
Alor	66,10	31,49	0,44	0,14	81,65	38,90	23,49	11,19	19,97	10	8
Lembata	45,42	29,67	0,42	0,12	53,87	35,18	6,34	4,14	24,78	14	7
Flores Timur	74,32	28,27	0,42	0,12	77,22	29,37	11,50	4,38	11,77	2	6
Sikka	160,24	49,30	0,45	0,22	87,96	27,06	47,52	14,62	12,56	5	18
Ende	37,89	13,73	0,43	0,06	76,14	27,59	8,30	3,01	22,86	13	1
Ngada	40,67	23,83	0,42	0,10	62,69	36,74	9,65	5,65	12,06	3	4
Manggarai	73,19	20,58	0,41	0,09	123,26	34,67	11,11	3,13	19,69	9	3
Rote Ndao	65,09	32,87	0,44	0,15	74,21	37,48	18,91	9,55	27,05	17	9
Manggarai Barat	83,77	28,21	0,43	0,12	99,06	33,35	20,60	6,94	16,82	8	5
Sumba Tengah	41,12	53,91	0,47	0,25	21,46	28,14	19,31	25,32	31,78	22	22
Sumba Barat Daya	184,11	49,90	0,44	0,22	113,92	30,88	63,13	17,11	27,48	19	19
Nagekeo	59,53	39,51	0,44	0,17	50,38	33,44	19,10	12,67	12,33	4	15
Manggarai Timur	106,21	35,78	0,42	0,15	73,08	24,62	28,03	9,44	25,06	15	11
Sabu Raijua	39,35	36,69	0,43	0,16	32,39	30,20	10,57	9,86	28,37	21	12
Malaka	75,05	37,07	0,43	0,16	58,09	28,70	19,28	9,52	14,42	7	13
Kota Kupang	70,01	14,64	0,42	0,06	161,57	33,78	18,12	3,79	8,61	1	2
NTT	1.989,48	34,80	0,44	0,15	1.763,53	30,84	585,78	10,25	19,96		

Sumber: BPS Provinsi NTT, Susenas Maret 2023 (data diolah)

Dari sisi jumlah, penduduk yang miskin secara multidimensi terbanyak terdapat di kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 237,91 ribu jiwa atau mencakup 12 persen dari total penduduk miskin di NTT (Gambar 2). Selanjutnya diikuti oleh Sumba Barat Daya, Sikka, kabupaten Kupang dan Sumba Timur. Jumlah kumulatif penduduk miskin pada 5 kabupaten ini mencakup 42,4 persen dari total penduduk miskin di NTT. Meskipun secara proporsi kota Kupang hanya memiliki 14,64 persen penduduk miskin, jumlah penduduk miskinnya menyumbang 3,52 persen dari total penduduk miskin di NTT. Jumlah penduduk miskin terendah terdapat di

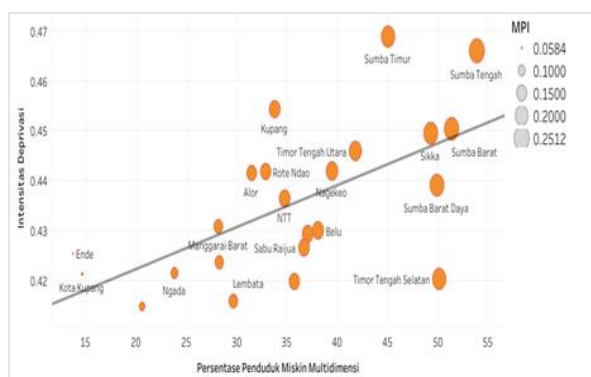
kabupaten Ende yang mencakup 1,9 persen dari total penduduk miskin di NTT.



Gambar 2. Sebaran Penduduk Miskin Multidimensi (%)

Indikator lain yang penting untuk dianalisis adalah intensitas deprivasi yang dialami oleh penduduk miskin.

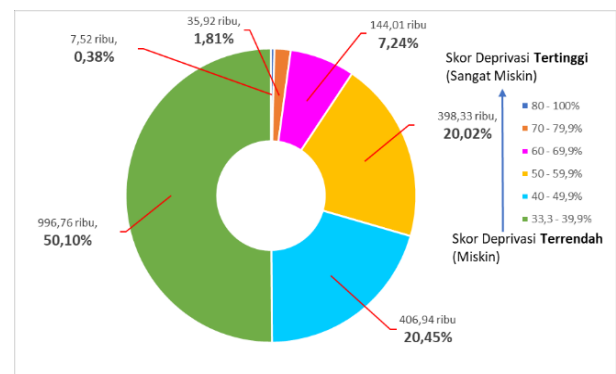
Secara rata-rata penduduk miskin multidimensi di NTT mengalami deprivasi pada 44 persen indikator tertimbang. Di tingkat kabupaten/kota, tidak terjadi variasi yang berarti pada intensitas deprivasi penduduk miskin meskipun angka persentase penduduk miskinnya menunjukkan variasi yang lebih tinggi. Intensitas deprivasi di seluruh kabupaten/kota di NTT berkisar antara 41 hingga 47 persen. Hal ini berarti, penduduk miskin di NTT mengalami deprivasi pada lebih dari 40 persen indikator tertimbang atau pada saat yang bersamaan terdeprivasi pada minimal dua dimensi. Hal ini sejalan dengan kondisi yang ditunjukkan pada gambar 1, yaitu penduduk NTT mengalami deprivasi pada minimal dua indikator pada waktu yang sama.



Gambar 3. Plot Persentase Penduduk Miskin Multidimensi dan Intensitas Deprivasi

Meskipun tingkat intensitas menunjukkan variasi yang tidak signifikan, terdapat hubungan yang positif antara insiden dan intensitas kemiskinan. Gambar 3 menunjukkan bahwa intensitas kemiskinan yang lebih tinggi diasosiasikan dengan kejadian kemiskinan yang lebih tinggi juga.

Kabupaten/kota dengan indeks kemiskinan multidimensi (MPI) yang lebih tinggi cenderung mengalami insiden kemiskinan yang lebih tinggi, dan penduduk miskin pada daerah-daerah ini mengalami deprivasi dengan intensitas yang lebih parah. Hal ini sejalan dengan keunggulan MPI yang meningkat sejalan dengan kenaikan intensitas deprivasi atau proporsi penduduk yang terdeprivasi. Artinya, jika penduduk miskin mengalami deprivasi pada semakin banyak indikator, nilai MPI akan meningkat.



Gambar 4. Distribusi Penduduk Menurut Skor Deprivasi

Indikator yang penting mendapat perhatian adalah distribusi penduduk miskin menurut tingkat deprivasi yang dialami. Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat 50,10 persen penduduk miskin di NTT yang mengalami tingkat deprivasi kurang dari 40 persen. Sementara itu, terdapat 29,44 persen penduduk miskin yang hidup dalam kondisi sangat miskin karena mengalami 50 persen atau lebih deprivasi tertimbang. Kelompok yang sangat miskin mencakup 10,25 persen dari total populasi, dengan jumlah mencapai

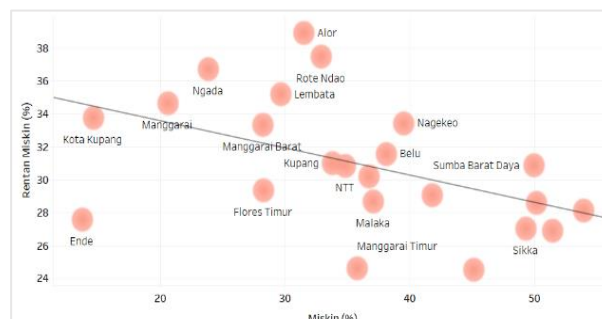
585,78 ribu jiwa. Pada tingkat kabupaten/kota, daerah yang memiliki insiden kemiskinan yang tinggi, proporsi penduduk yang hidup dalam kondisi sangat miskin secara multidimensi juga relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain dengan insiden kemiskinan yang lebih rendah. Di Sumba Tengah misalnya, lebih dari seperempat populasi masuk dalam kategori sangat miskin, atau mencakup 47,0 persen dari total penduduk miskin di daerah tersebut.

Pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah (MPI lebih kecil), UNDP merekomendasikan analisis terhadap penduduk yang berada dekat dengan *cut off point* karena kelompok ini rentan miskin. Analisis terhadap penduduk yang memiliki kerentanan terhadap kemiskinan sangat penting untuk mengantisipasi *shock* yang dialami rumah tangga atau penduduk pada masa yang akan datang. Kelompok ini tidak miskin secara multidimensi, tetapi mengalami deprivasi (tertimbang) minimal 20 persen hingga kurang dari 33,3 persen pada seluruh indikator (UNDP, 2023).

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 30,84 persen penduduk NTT yang rentan menjadi miskin secara multidimensi. Pada tingkat kabupaten/kota, 24-40 persen populasi masuk dalam kelompok rentan miskin multidimensi.

Gambar 5 menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan multidimensi yang lebih rendah memiliki proporsi penduduk yang

rentan terhadap kemiskinan multidimensi yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang rentan miskin dan miskin mencakup proporsi yang sangat besar di NTT yaitu mencapai 65,64



Gambar 5. Plot Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk yang Rentan Miskin Multidimensi

persen dari total populasi.

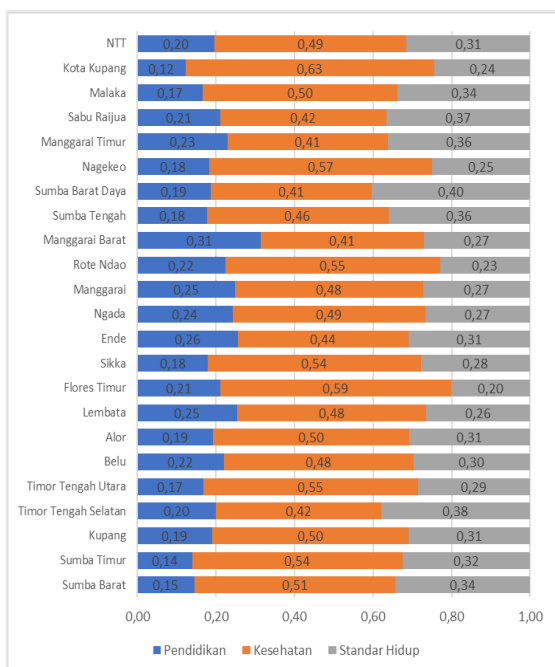
Pada beberapa kabupaten/kota, jumlah penduduk yang terkategori miskin dan rentan mencakup lebih dari 70 persen populasi, yaitu di Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sikka, Nagekeo, Timor Tengah Utara, Alor dan Rote Ndao. Pada kabupaten/kota lain di NTT, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan atau kerentanan berada pada rentang 40 – 69 persen. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya peningkatan pada MPI.

Kontribusi Dimensi Terhadap MPI

Dalam rangka mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di semua tempat, dimensi kemiskinan yang menjadi fokus analisis perlu mendapat perhatian khusus. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan penduduk miskin umumnya mengalami deprivasi pada lebih dari satu dimensi atau mengalami

kemiskinan karena terdeprivasi pada beberapa indikator sekaligus.

Dengan melakukan dekomposisi terhadap kontribusi masing-masing dimensi, ditemukan bahwa dimensi kesehatan menjadi penyebab yang lebih dominan bagi kemiskinan multidimensi di NTT (Gambar 6), diikuti oleh dimensi standar hidup dan dimensi pendidikan. Di Kota Kupang misalnya, dimensi kesehatan menyumbang 63 persen terhadap tingkat kemiskinan, dan di kabupaten lain seperti Nagekeo, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Flores Timur, Alor, Timor Tengah Utara, Kupang, Sumba Timur dan Sumba Barat, dimensi kesehatan menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan.

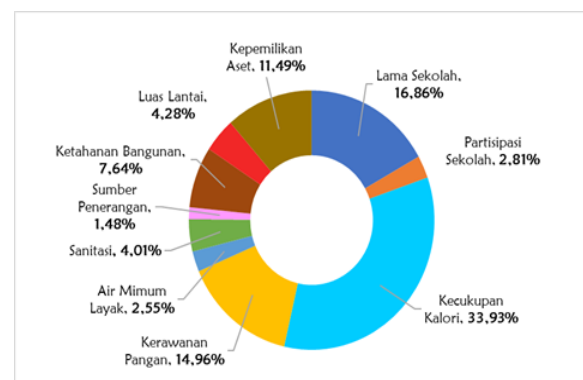


Gambar 6. Kontribusi Deprivasi Menurut Dimensi Terhadap MPI

Gambar 6 juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kabupaten yang memiliki dimensi kesehatan dan standar hidup dengan peranan yang hampir seimbang dalam menentukan kemiskinan, yaitu di Sabu Raijua,

Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Selatan. Sementara itu, dimensi pendidikan memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi kemiskinan multidimensi, kecuali pada kabupaten Rote Ndao, Manggarai, Ngada, Flores Timur dan Lembata, karena kontribusi dimensi pendidikannya hampir setara dengan dimensi standar hidup.

Jika ditinjau berdasarkan masing-masing indikator, deprivasi pada kecukupan energi (konsumsi kalori) memberikan kontribusi sebesar 33,93 persen terhadap kemiskinan, diikuti oleh indikator lama sekolah, kerawanan pangan dan kepemilikan aset. Secara bersama-sama kontribusi keempat indikator ini mencapai 77,23 persen terhadap total kemiskinan (Gambar 7).

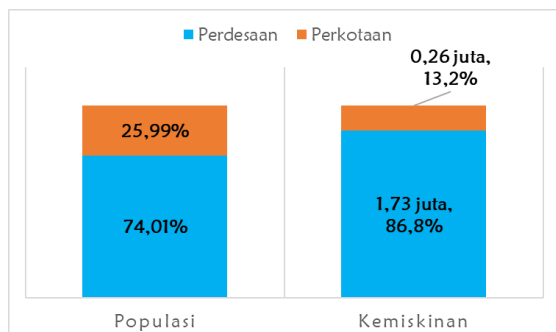


Gambar 7. Kontribusi Deprivasi Indikator Terhadap MPI

Kemiskinan Multidimensi Menurut Daerah Perdesaan dan Perkotaan

Kemiskinan di NTT dari sisi multidimensi masih terkonsentrasi di daerah pedesaan baik dari sisi insiden maupun intensitas kemiskinan (Gambar 8). Jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai 1,73 juta jiwa (86,8

persen). Hal ini berarti hampir 9 dari antara 10 orang miskin di NTT tinggal di daerah pedesaan. Sementara itu, hanya 13,2 persen penduduk miskin yang



Gambar 8. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan dan Perkotaan

tinggal di daerah perkotaan.

Tabel 4 menyajikan perbandingan beberapa indikator kemiskinan multidimensi antara pedesaan dan perkotaan. Dibandingkan dengan seluruh populasi penduduk perkotaan, terdapat kurang lebih 2 dari sepuluh orang di perkotaan yang terkategori miskin. Proporsi ini adalah setengah dari kondisi di pedesaan karena kurang lebih 4 dari 10 penduduk di desa hidup dalam kemiskinan multidimensi.

Tabel 4. Perbandingan Indikator Kemiskinan Multidimensi Perkotaan dan Pedesaan, 2023

Indikator	Perkotaan	Pedesaan
Proporsi Penduduk Miskin (H)	0,18	0,41
Intensitas Kemiskinan (A)	0,41	0,44
MPI	0,07	0,18
Kontribusi Dimensi Terhadap MPI		
Dimensi Pendidikan	0,13	0,21
Dimensi Kesehatan	0,60	0,47
Dimensi Standar Hidup	0,28	0,32

Sumber: BPS Provinsi NTT, Susenas Maret 2023 (data diolah)

Di daerah pedesaan, penduduk miskin mengalami deprivasi pada sebesar 44 persen dari seluruh indikator tertimbang, sedangkan di daerah perkotaan rata-rata intensitas kemiskinan adalah 41 persen. Disparitas kemiskinan di daerah pedesaan dan perkotaan juga tergambar pada nilai MPI. Nilai MPI untuk pedesaan adalah 0,18 sedangkan daerah perkotaan 0,07.

Ditinjau menurut dimensi, struktur kemiskinan di pedesaan berbeda dengan daerah perkotaan. Kemiskinan perkotaan utamanya dikaitkan dengan dimensi kesehatan, yaitu sebesar 60 persen sementara dimensi kesehatan berkontribusi sebesar 47 persen terhadap kemiskinan di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan konsumsi kalori di NTT yang secara umum lebih tinggi di daerah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2023) dan kondisi kerawanan pangan yang lebih rendah di daerah pedesaan karena sumber pangan umumnya berasal dari sektor pertanian yang terkonsentrasi di daerah pedesaan (Badan Pangan Nasional, 2023). Pada dimensi standar hidup, kondisi kemiskinan baik di kota maupun di pedesaan tidak mengalami perbedaan yang besar dengan kontribusi dimensi ini pada MPI adalah 0,28 untuk daerah perkotaan dan 0,32 untuk daerah pedesaan. Sementara itu, dimensi pendidikan di perkotaan menyumbang 13 persen terhadap MPI, sedangkan di pedesaan 21 persen. Perbedaan dapat dikaitkan dengan kemudahan akses

pendidikan di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Perbandingan MPI dan Pendekatan Pengeluaran

Proporsi penduduk yang mengalami deprivasi dan dikategorikan miskin secara multidimensi lebih tinggi dibandingkan kemiskinan moneter (19,96 persen pada pendekatan moneter (Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2024) dan 34,80 pada pendekatan multidimensi). Secara rata-rata, pendekatan multidimensi memberikan perkiraan persentase penduduk miskin 1,86 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan kebutuhan dasar atau pengeluaran. Pada kabupaten Sikka dan Nagekeo, tingkat kemiskinan multidimensi mencapai masing-masing 3,93 kali dan 3,21 kali lebih tinggi dibandingkan kemiskinan moneter (Tabel 3). Perbedaan hasil penghitungan kemiskinan pada dua pendekatan ini menyebabkan terjadi perubahan peringkat kabupaten/kota seperti yang disajikan pada tabel 3.

Jika dilakukan disagregasi menurut status kemiskinan moneter (Tabel 5), terdapat irisan sebesar 12,39 persen yang mengalami kemiskinan dan 57,64 persen tidak mengalami kemiskinan pada kedua pendekatan tersebut. Sementara itu, terjadi 30 persen *mismatch* antara dua pendekatan ini. Terdapat 22,40 persen penduduk yang tidak diklasifikasikan sebagai miskin menurut garis kemiskinan tahun 2023 ternyata mengalami deprivasi pada lebih dari 1 dimensi. Sebaliknya, 7,57

persen penduduk yang tidak mengalami deprivasi pada 1/3 atau lebih indikator tertimbang dikategorikan miskin menurut pendekatan pengeluaran.

Tabel 5. Perbandingan Pendekatan Moneter dan Multidimensi

		Moneter		Total
		Tidak Miskin	Miskin	
Multidimensi	Tidak Miskin	57,64	7,57	65,20
	Miskin	22,40	12,39	34,80
	Total	80,04	19,96	100,00

Sumber: BPS Provinsi NTT Susenas Maret 2023, (data diolah)

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian pada berbagai negara yang dirangkum dalam Prasetyo (2022), penelitian Artha & Dartanto (2018) dan Salam dkk, (2022), dengan kesimpulan bahwa terdapat disparitas yang signifikan antara persentase penduduk miskin menurut ukuran moneter dengan persentase penduduk miskin berdasarkan deprivasi multidimensi. Penjelasan yang dapat diberikan terkait fenomena tersebut adalah kemiskinan multidimensi menangkap lebih banyak deprivasi yang dialami oleh total populasi dibandingkan dengan kemiskinan moneter. Secara umum, hasil ini bisa diinterpretasikan sebagai keterbatasan pengeluaran penduduk untuk meningkatkan kondisi pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Hal ini berarti, pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan standar garis kemiskinan tidak menjamin bahwa penduduk tersebut dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya pada dimensi kesejahteraan selain ekonomi (Alkire & Santos, 2014) dan sebaliknya, kondisi tidak mengalami deprivasi multidimensi tidak berarti mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk dapat mengukur kemiskinan secara lebih komprehensif.

4. Kesimpulan dan Saran

Sejalan dengan tujuan SDGs untuk menghapus kemiskinan dalam semua bentuk di manapun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan dengan pendekatan multidimensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTT. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan multidimensi jauh lebih tinggi dibandingkan kemiskinan moneter. Kabupaten kota yang memiliki indeks kemiskinan multidimensi (MPI) yang lebih tinggi cenderung mengalami insiden dan intensitas kemiskinan yang lebih tinggi. Daerah-daerah tersebut juga memiliki proporsi penduduk yang lebih tinggi yang tergolong sangat miskin. Sementara itu daerah-daerah dengan nilai MPI yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kerentanan terhadap kemiskinan multidimensi yang lebih tinggi.

Dengan melakukan analisis dimensi pendorong kemiskinan, terdapat empat indikator utama yang perlu mendapat sorotan pemerintah untuk dilaksanakan intervensi program yaitu kecukupan konsumsi kalori, kerawanan pangan, lama sekolah dan kepemilikan aset.

Dengan demikian, program-program pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada keempat indikator tersebut. Pada dimensi kesehatan, dapat dilakukan peningkatan ketersediaan akses terhadap pangan dan peningkatan konsumsi seperti dengan mendorong peningkatan produksi pangan, pengendalian harga dan pemotongan rantai distribusi pangan. Khusus pada dimensi pendidikan, karena indikator lama sekolah mengukur tingkat pendidikan yang dipengaruhi oleh kondisi pada masa lalu, maka intervensi program perlu diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah sehingga menjamin peningkatan pengetahuan anggota rumah tangga dan memperbaiki kondisi kesejahteraan di masa depan. Sedangkan pada dimensi standar hidup yang layak, kepemilikan aset perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memudahkan komunikasi dan mobilitas penduduk.

Intervensi program pemerintah juga dapat memperhatikan perbedaan struktur dimensi kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan dan antar kabupaten/kota. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Penelitian kemiskinan multidimensi ini juga memiliki kelemahan, yaitu penggunaan indikator pada dimensi kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator kesehatan umumnya karena keterbatasan data. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat

melengkapi keterbatasan ini dengan menggunakan indikator kesehatan yang lebih sesuai. Selain ketiga dimensi yang telah diteliti di atas, penggunaan dimensi lain seperti pekerjaan informal, pemberdayaan, keamanan dari kekerasan dan modal sosial dapat dieksplorasi untuk melihat nilai tambahnya pada pengukuran kemiskinan multidimensi.

Daftar Pustaka

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. 1–36.
- Alkire, S., & Foster, J. (2008). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *OPHI Working Paper*, 7, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement. *The Journal of Economic Inequality*, 52(27), 1–82. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10888-011-9181-4>
- Alkire, S., Nagoles, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. (2023). On track or Not? Projecting the Global Multidimensional Poverty Index. *Journal of Development Economics Volume 165, October 2023*, 103150, 165. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103150>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). *Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Oxford Department of International Development OPHI Working Paper No. 38 Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries*. https://ophi.org.uk/sites/default/files/2024-03/OPHI-wp38_with_note.pdf
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Artha, D. R. P., & Dartanto, T. (2018). The Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia: Measurements, Determinants and Its Policy Implications. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(3), 1–38. https://www.researchgate.net/publication/331178536_The_multidimensional_approach_to_poverty_measurement_in_Indonesia_Measurements_determinants_and_its_policy_implications
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023*. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2023 (Vol. 27)*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2023*. <https://www.bps.go.id/id/query-builder>

- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Indeks Pembangunan Manusia 2023* (Volume 18). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024c). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2012-2023*. <https://www.bps.go.id/id/query-builder>
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023*. <https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Brucker, D. L. (2017). The Association of Food Insecurity with Health Outcomes for Adults with Disabilities. *Disability and Health Journal*, 10(2), 286–293. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.12.006>
- Cook, J. T., Frank, D. A., Levenson, S. M., Neault, N. B., Heeren, T. C., Black, M. M., Berkowitz, C., Casey, P. H., Meyers, A. F., Cutts, D. B., & Chilton, M. (2006). Child Food Insecurity Increases Risks Posed by Household Food Insecurity to Young Children's Health. *Journal of Nutrition*, 136(4), 1073–1076. <https://doi.org/10.1093/jn/136.4.1073>
- Hanmer, J., Dewalt, D. A., & Berkowitz, S. A. (2018). *Association between Food Insecurity and Health-Related Quality of Life : a Nationally Representative Survey*. 1638–1647. <https://doi.org/10.1007/s11606-020-06492-9>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome)*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023*. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (2019).
- Perkumpulan Prakarsa. (2023). *Satu Dekade Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2021*. Perkumpulan Prakarsa. <https://theprakarsa.org/ikm/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-IKM-Nasional-2012-2021-v6-digital.pdf>
- Prasetyo, O. R. (2022). Explaining The Gap between Multidimensional and Monetary Poverty : A Panel Data Analysis. In *International Institute of Social Studies* (Nomor December). <http://hdl.handle.net/2105/65427>
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2022). Analisis Kemiskinan pada Rumah Tangga di Jawa Timur Melalui Pendekatan Multidimensi dan Moneter. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480>
- UNDP. (2023). Unstacking Global Poverty: Data for High Impact Action. *Global Multi-dimensional Poverty Index 2023*, 1–2.